

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi paparan terkait 1) latar belakang penelitian, 2) rumusan masalah, 3) tujuan penelitian, 4) metode penelitian, 5) manfaat penelitian, dan 6) struktur organisasi tesis, dan 7) definisi operasional.

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dengan dukungan pesatnya perkembangan teknologi digital, tumbuh subur berbagai *platform* media sosial. Seperti dikemukakan oleh Cross (2013, hlm. 2) media sosial adalah istilah yang menggambarkan bermacam-macam teknologi yang digunakan untuk mengikat orang untuk berkolaborasi, saling bertukar informasi, dan berinteraksi melalui pesan yang berbasis web. Adapun menurut Nasrullah (2015, hlm. 11) media sosial memiliki kekuatan pada *user-generated content* (UGC) yang artinya, konten di dalam media sosial dihasilkan oleh para penggunanya, bukan oleh editor di institusi media massa. Salah satu media sosial yang kini sedang digandrungi adalah *twitter*.

Twitter merupakan layanan jejaring sosial dan *microblog* daring yang memungkinkan para penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks. Data yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebutkan, bahwa pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Indonesia menempati peringkat 5 pengguna Twitter terbesar di dunia. Posisi Indonesia hanya kalah dari USA, Brazil, Jepang dan Inggris.

Kemudahan mengakses media sosial tersebut tidak diimbangi dengan perilaku para penggunanya. Sehingga, dalam konteks ini masyarakat masih menyalahgunakan media sosial dengan berbagai bentuk pelanggaran. Tidak jarang pelanggaran tersebut melanggar hukum yang dapat dipidana. Sejalan dengan Bahar *et.al.* (2015), dampak negatif yang ditimbulkan adalah orang lebih suka membuat pernyataan atau perkataan tidak baik secara sepihak dengan menunjuk pihak lainnya yang bisa jadi tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah penghinaan kepada orang lain melalui media sosial. Dengan semakin

memanfaatkan media sosial maka kemungkinan melakukan suatu tindak pidana penghinaan pun meningkat.

Dari beberapa bentuk pelanggaran, dalam penelitian ini akan dikaji fenomena bahasa dalam twitter, khususnya di dalam kolom *reply twitter*. Bahasa di internet merupakan fenomena yang khas. Kekhasan itu tampak pada pengaruh karakteristik teknologi Internet yang secara umum diidentifikasi sebagai “*interactivity, demassification, asynchronous, and simultaneous*” (Herring, 2012).

Adapun pelanggaran yang terjadi di dalam twitter tersebut salah satunya adalah perundungan siber. Sejalan dengan Sari (2017, hlm. 146) salah satu bentuk kekerasan yang sering dialami dalam dunia maya adalah perundungan siber. Diperkuat oleh Indrayani dan Johansari (2019, hlm. 276), perkembangan teknologi media sosial membawa dua sisi, yaitu baik dan buruk. Salah satu sisi buruk yang terjadi adalah *cyberbullying* di media sosial.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan istilah perundungan siber sebagai padanan kata *cyberbullying*. Perundungan siber merupakan salah satu tindakan penyalahgunaan media sosial. Priyatna (2010, hlm. 32) “Perundungan siber adalah suatu ejekan, ancaman, ditakut-takuti, dipermalukan dan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang melalui jejaring sosial dengan sengaja dan berulang kali untuk menyakiti korban”.

Sejalan dengan pernyataan Steffgen *et.al* (2011, hlm. 643), perundungan siber adalah suatu tindakan yang ditujukan pada seseorang melalui pesan teks, email, pesan gambar atau video yang bertujuan untuk mengolok-olok, memaki, dan mengancam. Penyalahgunaan teknologi meningkat sehingga menyebabkan banyak insiden seperti aksi dan tindakan mengancam, melecehkan, memermalukan serta menghina (Hidajat *et.al.*, 2015, hlm. 77). Perundungan siber dapat diartikan sebagai perlakuan untuk memermalukan, menghina, menakut-nakuti, melukai atau menyebabkan kerugian bagi pihak yang lain dengan menggunakan sarana komunikasi teknologi informasi.

Perundungan siber menimbulkan keadaan di mana korban terus-menerus mendapatkan pesan negatif dari pelaku perundungan melalui internet pada media sosialnya. Terlebih lagi dunia siber memberikan kesempatan relatif mudah bagi

pelaku untuk sengaja menyakiti korban dan pada akhirnya memungkinkan terjadi intimidasi tanpa dibatasi ruang dan waktu (Hinduja dan Patchin, 2009, hlm. 1).

Temuan data mengenai perundungan siber di Indonesia yang merupakan salah satu hasil survei APJII (APJII, 2019). Survei terhadap 5.900 pengguna internet di 514 kota di Indonesia ini dilakukan pada 9 Maret sampai 14 April 2019. Dari survei tersebut ditemukan 49% responden menyatakan dibully di media sosial. Hal ini berarti ada 2891 orang mengalami perundungan siber dalam kurun waktu satu bulan. Diantara yang mengalami perundungan siber pernah berpikir serius untuk bunuh diri bahkan sampai benar melakukan bunuh diri dan rata-rata korban dirundung oleh akun *anonym* atau akun *fake*. Sejalan dengan itu, sebanyak 90,4% responden dalam penelitian O'Dea dan Campbell (2012, hlm. 216) menyetujui bahwa perundungan siber adalah hinaan dari seseorang yang tidak dikenal.

Perilaku perundungan siber tersebut diperlihatkan dalam beberapa bentuk perilaku (Willard, 2007, hlm. 2), yaitu: *flaming* (terbakar), *harrasment* (gangguan), *cyberstalking*, *denigration*, *masquerade* (peniruan), *outing* dan *trickery*, *exclusion* (pengeluaran). Ketujuh jenis perundungan siber tersebut mengindikasikan, bahwa perundungan siber menitikberatkan pada kekerasan verbal yang secara tidak langsung akan berdampak pada kondisi psikis atau emosional dari korban. Bauman *et.al* (2013, hlm. 342) menjelaskan *cyberbullying* dapat memberikan dampak negatif yang lebih berat lagi terhadap korban seperti isolasi sosial, depresi, menyakiti dirinya sendiri, penggunaan narkoba, dan remaja bisa memiliki ide bunuh diri karena tidak kuat mengalami tekanan yang diterimanya.

Adapun salah satu dampak yang paling serius dari perundungan siber, yaitu fenomena bunuh diri yang dikenal dengan istilah *cyberbullicide* atau bunuh diri akibat dirundung secara siber (Hinduja & Patchin, 2010, hlm. 207). Adapun penelitian yang dilakukan Hinduja & Patchin (2010, hlm. 206) mengungkapkan bahwa 20% responden dilaporkan pernah berpikir secara serius untuk bunuh diri. Semua bentuk perundungan secara signifikan berkaitan dengan meningkatnya keinginan untuk bunuh diri. Bahkan, percobaan bunuh diri yang dicoba dilakukan oleh korban perundungan siber ini jumlahnya hampir dua kali lebih banyak daripada remaja yang tidak pernah mengalami perundungan siber.

Temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama UNICEF pada tahun 2011 hingga 2012, menyatakan bahwa kasus perundungan siber di Indonesia cukup tinggi. Penelitian tersebut melibatkan 400 anak dan remaja pada rentang usia 10 hingga 19 tahun yang berada di 11 provinsi di Indonesia. Hasil riset menunjukkan bahwa 13% menyatakan mengalami perundungan siber dalam bentuk hinaan, ancaman, dan dipermalukan di media sosial dan pesan teks. Tidak hanya itu, 9% menyatakan pernah mengirimkan pesan berupa hinaan dan kemarahan melalui media sosial dan 14% melalui pesan teks. Jumlah ini berarti 13 dari 100 responden merupakan korban perundungan siber, dan 23 dari 100 responden merupakan pelaku perundungan siber.

Rahayu (2012, hlm. 23) menyatakan bahwa dampak perundungan siber kepada para korban tidak berhenti sampai pada tahap depresi saja, melainkan sudah sampai pada tindakan yang lebih ekstrim yaitu bunuh diri. Dampak dari tindakan perundungan siber ini diperkuat oleh Widyarini (2018) yang mengatakan bahwa korban akan menderita emosi negatif seperti rasa sedih, tidak berdaya, marah, dan dendam. Efeknya pun membekas dalam jangka panjang. Adapun faktor perundungan siber tersebut memberikan dampak terhadap psikologis korban, 37% mengalami kepercayaan diri rendah, 30% mengalami penurunan prestasi di sekolah, 28% mengalami depresi, dan 25% mengalami gangguan pola tidur (Meodia, 2016).

Salah satu ilmu yang dapat dipakai untuk menganalisis perundungan siber adalah pragmatik. Leech (1993, hlm. 8) mengartikan pragmatik sebagai studi tentang makna dalam hubungannya dengan situasi ujar. Dapat disimpulkan bahwa pengkajian pragmatik adalah kajian makna yang mengaitkan konteks dengan penutur bahasa dan melibatkan situasi ujar dengan elemen bahasa. Ada beberapa lingkup kajian pragmatik salah satunya yaitu, implikatur.

Kajian implikatur mempunyai peranan yang tepat untuk mengkaji tuturan dalam penggunaan bahasa. Dalam penelitian pragmatik, analisis implikatur ini digunakan untuk mengungkap maksud yang tersirat dari suatu tuturan. Grice (1975, hlm. 25) memaparkan bahwa implikatur merupakan makna yang tersirat dari suatu tuturan, karena dalam praktik berbahasa maksud suatu tuturan atau makna tidak selalu terealisasikan secara tegas dalam tuturan yang disampaikan penutur.

Kemudian, Brown dan Yule (1996, hlm. 31) mendefinisikan bahwa istilah implikatur dipakai untuk menerangkan apa yang mungkin diartikan, disarankan atau dimaksudkan oleh penutur yang berbeda dengan apa yang sebenarnya dikatakan oleh penutur. Terkadang dibalik sebuah tuturan, ada makna yang tersembunyi dan itu tidak dinyatakan secara tersurat melainkan secara tersirat.

Implikatur percakapan dalam kamus linguistik diartikan sebagai makna yang implisit atau tidak diungkapkan dalam tuturan yang diucapkan. Analisis implikatur digunakan untuk membedah beragam bentuk tuturan, lirik lagu, pidato, komentar, bahkan karya sastra, seperti puisi, syair, atau cerpen. Ada beberapa jenis implikatur percakapan. Menurut Levinson (1983, hlm. 97), hanya ada dua jenis implikatur percakapan yaitu implikatur percakapan umum (implikatur yang munculnya di dalam percakapan dan tidak memerlukan konteks khusus) dan implikatur percakapan khusus (suatu implikatur yang kemunculannya memerlukan konteks khusus).

Dalam pemaknaan implikatur sangat tergantung pada fitur-fitur tertentu dari konteks. Sementara, implikatur percakapan bukan tergantung pada konteks melainkan pada proposisi yang dituturkan. Grice (1975, hlm. 45) mengungkapkan, *“make your conversational contribution such as is required, at the stage at which it occurs, by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged”*. Pada dasarnya pihak-pihak yang terlibat berusaha bekerja sama dalam berkomunikasi, sehingga komunikasi dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuannya. Adapun panduan yang mengaturnya oleh Grice disebut prinsip kerja sama.

Grice melengkapi teori prinsip kerja sama dengan teori maksim percakapan. Teori maksim percakapan terdiri atas empat maksim sebagai berikut: pertama, maksim kualitas; kedua, maksim kuantitas; maksim relevansi; dan maksim cara. Adapun pelanggaran terhadap maksim bisa terjadi, jika tuturan terindikasi sebagai informasi yang mengada-ada, memanipulasi fakta, dan tidak dapat didukung oleh bukti yang kuat.

Teori dasar percakapan lain dengan *cooperative principle* adalah *non-observance* teori *Maxims Conversational* yang diusulkan oleh Grice (1975). Ketidakpatuhan maksim diklasifikasikan ke dalam 5 kategori, yaitu: pertama,

flouting the maxims; kedua, *violating the maxims*; ketiga, *infringing the maxims*; keempat, *opting out the maxims*; kelima, *suspending the maxims*. Penelitian ini perlu dilakukan sebagai upaya pencarian kebenaran atau pembuktian terhadap dugaan perkara perundungan siber dengan muatan implikatur, sehingga dapat dianalisis dan disimpulkan baik melalui pragmatik maupun linguistik forensik.

Linguistik forensik adalah studi ilmiah mengenai bahasa yang diterapkan untuk keperluan forensik dan pernyataan hukum (McMenamin, 2000, hlm. 4). Syaifullah (2009, hlm. 7) pun mengemukakan bahwa linguistik forensik adalah bidang linguistik terapan yang melibatkan hubungan antara bahasa, hukum, dan aspek kejahatan, sehingga kajian linguistik dikenal dengan studi bahasa teks-teks hukum. Berdasarkan paparan di atas, linguistik forensik erat kaitannya dengan penggunaan bahasa dan aspek hukum. Terkait aspek hukum, perundungan siber dirumuskan dalam Surat Edaran Kapolri Se/6/X/2015 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016) dalam juncto 45C.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi secara umum. UU ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang ini. Setiap orang yang melakukan perbuatan hukum ini, baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia.

Non-observance maxims merupakan salah satu bagian dalam menentukan makna tersirat dari ujaran-ujaran warganet yang mengandung perundungan siber. Sejauh ini penelitian tentang non-observance maksim sudah ada beberapa penelitian yang membahas, yaitu (Chaipreukkul, 2013; Prodanović dan Stankić, 2014; Majid dan Abdulla, 2018). Chaipreukkul (2013) membahas tentang jenis-jenis ketidakpatuhan terhadap prinsip kerjasama Grice yang digunakan dalam wacana humor sitkom berjudul *The Big Bang Theory*. Hasilnya terdapat lima bentuk ketidakpatuhan terhadap prinsip kerjasama Grice, diantaranya: *flouting*, *violating*, *opting out*, *infringing*, dan *suspending* yang menyebabkan munculnya humor. Prodanović dan Stankić (2014) membahas tentang jenis-jenis ketidakpatuhan terhadap prinsip kerjasama yang memiliki tujuan khusus dalam

percakapan tertentu yang menghasilkan efek humor. Penelitian tersebut menghasilkan ketidakpatuhan prinsip kerjasama dalam wacana humor. Majeed dan Abdulla (2018) membahas tentang mengapa dan bagaimana Departemen Luar Negri A.S tidak mematuhi prinsip kerjasama. Penelitian tersebut terdapat tiga jenis prinsip kerjasama, yaitu: *flouting*, *opting out*, dan *violating*.

Penelitian lainnya (Fegenbush, 2009; Whittaker dan Kowalski, 2014; Abaido, 2019) yang membahas tentang perundungan siber yaitu Fegenbush (2009) melakukan analisis perundungan siber untuk memberikan hasil analisis yang komprehensif dari penelitian terkini tentang perundungan siber dan isu-isu yang mengelilinginya untuk mengembangkan hipotesis yang dapat diteliti di masa depan dibidang yang berkaitan dengan kebijakan dan protokol sekolah. Adapun penelitian lainnya yang membahas tingkat prevalensi perundungan siber dikalangan mahasiswa usia perguruan tinggi, tempat di mana perundungan terjadi, dengan fokus khusus pada media sosial dan persepsi perundungan siber sebagai fungsi fitur target. Hasil dari penelitian tersebut adalah menemukan bahwa sms dan media sosial menjadi tempat yang paling umum digunakan untuk viktimisasi perundungan siber dan komentar agresif memengaruhi persepsi perundungan siber. Abaido (2019) juga membahas tentang penyebaran perundungan siber di kalangan mahasiswa dalam komunitas Arab, sifat dan tempatnya. Hasil dari penelitian tersebut, yaitu 91% dari sampel penelitian mengkonfirmasi adanya tindakan cyberbullying di media sosial dengan Instagram (55,5%), Facebook (38%), dan Twitter (35,5%) sebagai yang teratas tiga platform tempat mereka merasakan terjadinya cyberbullying.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada “implikatur dalam ujaran di kolom reply twitter pada dugaan perkara *cyberbullying*” menggunakan teori Grice (dalam Majid dan Abdulla 2018) yang membahas *non-observance of conversational maxims*. Penelitian ini berupaya melihat makna tersirat dari ujaran-ujaran yang diduga adanya perundungan di kolom *reply twitter* milik DL.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah pokok penelitian ini adalah adanya dugaan perkara perundungan siber di kolom *reply twitter* milik DL. Sehingga penelitian ini, diharapkan menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Implikatur percakapan apa yang terkandung dalam ujaran-ujaran perundungan siber?
2. Apa implikasi forensik dari penggunaan implikatur percakapan yang mengandung perundungan siber itu dikaji oleh perspektif linguistik forensik dan konsekuensi pelanggaran hukum berdasarkan UU ITE?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menemukan implikatur percakapan pada ujaran yang mengandung dugaan perkara perundungan siber di kolom *reply twitter*.
2. Untuk menemukan bagaimana perspektif linguistik forensik dan konsekuensi pelanggaran hukum berdasarkan UU ITE dalam menyimpulkan hasil analisis implikatur percakapan dalam ujaran di kolom *reply twitter*.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Peneliti melakukan pendeskripsian secara faktual mengenai fenomena kebahasaan yang terkait. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga menemukan makna tersembunyi di balik objek penelitian. Dengan kata lain, metode ini bertujuan untuk mengungkap adanya perundungan siber di dalam kolom *reply twitter* milik DL.

Dalam penelitian ini, proses analisis data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah berikut: 1) mengidentifikasi data dengan cara *purposive sampling* atau dengan kata lain, memilih ujaran-ujaran yang mengandung perundungan siber, 2) mengidentifikasi ketidakpatuhan maksim menggunakan teori Grice (1975, hlm. 28), 3) mengklasifikasikan data ujaran-ujaran yang diindikasikan mengandung unsur perundungan siber berdasarkan Willard (2007, hlm. 2), 4) menarik

kesimpulan dari hasil analisis data tersebut dengan tinjauan linguistik forensik dan konsekuensi pelanggaran hukum berdasarkan UU ITE.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoretis. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan yang bersifat praktis sebagai berikut:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam hal penggunaan bahasa, terlebih memberi pengetahuan mengenai teori-teori pragmatik, serta cara pengaplikasian teori-teori tersebut terhadap permasalahan kebahasaan di lapangan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkap maksud dari ujaran perundungan siber dan sebagai upaya pencarian atau pembuktian bahwa tuturan tersebut mengandung tuturan perundungan siber.
- 3) Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi para pengguna media sosial untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, khususnya penggunaan media sosial sebagai sarana ekspresi perasaan yang tidak melanggar undang-undang informasi dan transaksi elektronik, sehingga tidak terjadi keresahan bagi masyarakat Indonesia yang menjadi korban perundungan siber.
- 4) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai rujukan oleh siapa saja sebagai acuan dalam penggunaan media dan berekspresi tanpa melanggar norma sosial dan norma hukum.
- 5) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penegak hukum dalam meninjau dan menganalisis ujaran yang mengandung unsur perundungan di ruang virtual.

1.6 Struktur Organisasi Tesis

Hasil penelitian ini disajikan menjadi lima bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi tesis. Bab dua merupakan kajian pustaka, sebagai landasan yang digunakan dalam penelitian

ini. Bab tiga terdiri dari, desain penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data. Bab empat memaparkan tentang temuan dan pembahasan penelitian, Selanjutnya yang terakhir bab lima, yaitu berisikan kesimpulan serta saran yang selaras dari penelitian ini.

1.7 Definisi Operasional

Pada bagian ini akan berisi istilah kunci yang akan digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini yaitu:

1. Implikatur percakapan adalah proposisi atau “pernyataan” implikatif, yaitu apa yang mungkin diartikan, disiratkan atau dimaksudkan oleh penutur, yang berbeda dari apa yang sebenarnya dikatakan oleh penutur di dalam suatu percakapan (Grice, 1975, hlm. 260).
2. *The non-observance of maxim* merupakan teori ketidakpatuhan atau cara pelanggaran maksim konversasional yang diusulkan oleh Grice (1975). Pelanggaran tersebut diklasifikasikan ke dalam 5 kategori, yaitu: a) *Flouting the maxim*, b) *Violating the maxim*, c) *Infringing the maxim*, d) *Opting out the maxim*, e) *Suspending the maxim*.
3. Perundungan siber adalah suatu tindakan yang ditujukan pada seseorang melalui pesan teks, email, pesan gambar atau video yang bertujuan untuk mengolok-olok, memaki, dan mengancam (Steffgen *et.al*, 2011:643).
4. *Twitter* adalah layanan jejaring sosial dan *microblog* siber yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter akan tetapi pada tanggal 07 November 2017 bertambah hingga 280 karakter yang dikenal dengan sebutan kicauan (*tweet*).